

PERAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DALAM MEWUJUDKAN TOLERANSI DI KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

¹⁾Syarif Redha Fachmi Al Qadrie *, ²⁾Annisa Umniyah

^{1), 2)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

¹⁾redhalgadriy@fisip.untan.ac.id ²⁾annisaumni@gmail.com

*redhalgadriy@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan negara majemuk yang didasarkan atas kesamaan asal-usul sosial budaya, geografis dan sejarah, juga didasarkan pada kesatuan pendapat, ideologi dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila. Sementara itu, kesatuan pendapat, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia tercantum secara jelas dalam lambang negara yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengandung makna “beraneka ragam (suku bangsa, agama, bahasa)” namun tetap satu (Indonesia). Toleransi di tengah kemajemukan bangsa Indonesia dewasa ini dapat di lihat salah satunya dari laporan SETARA Institute terkait Indeks Kota Toleran (IKT) 2022, Kota Singkawang kembali menjadi kota paling toleran se-Indonesia dengan skor tertinggi. Predikat kota dengan indeks toleransi tertinggi tahun 2022 adalah pencapain ke tiga kali nya sejak tahun 2018. Oleh karena itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah Kota Singkawang dalam mewujudkan toleransi di Kota Singkawang. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa Pemerintah Kota Singkawang mempunyai kontribusi besar dalam mempertahankan nilai-nilai toleransi agar tetap terjaga. Selain itu, pihak lain seperti tokoh agama dan masyarakat juga sangat berperan penting dalam mewujudkan toleransi di Kota Singkawang

Kata Kunci : Kota Singkawang, Peran Pemerintah Daerah, Toleransi

Abstract

The Indonesian nation is a pluralistic country based on the similarity of socio-cultural, geographical and historical origins, also based on the unity of opinion, ideology and philosophy of life of the nation and state. The views, ideology and philosophy of life of the Indonesian people are reflected in the precepts of Pancasila. Meanwhile, the unity of opinion, ideology and philosophy of life of the Indonesian nation is clearly stated in the state symbol that reads “Bhinneka Tunggal Ika”, which means “diverse (ethnicity, religion, language)” but still one (Indonesia). Tolerance in the midst of the plurality of the Indonesian nation today can be seen from the SETARA Institute report related to the Tolerant City Index (IKT) 2022,

Singkawang City is again the most tolerant city in Indonesia with the highest score. The title of the city with the highest tolerance index in 2022 is its third achievement since 2018. Therefore, this research aims to find out and analyze the role of the Singkawang City local government in realizing tolerance in Singkawang City. In this writing, a qualitative research method is used with data collection techniques through interviews with sources. The result of this research is that it is known that the Singkawang City Government has a major contribution in maintaining tolerance values to be maintained. In addition, other parties such as religious and community leaders also play an important role in realizing tolerance in Singkawang City.

Keywords : *Singkawang City, Role Of Local Government, Tolerant*

PENDAHULUAN

Keberagaman etnis dan agama yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu bahasan dalam hubungan internasional. Adanya kemajemukan tersebut berpotensi menimbulkan konflik di dalam negara yang kemudian akan mempengaruhi stabilitas sistem internasional. Etnisitas merupakan salah satu faktor penting dalam membangun sistem internasional setelah terjadinya perang dingin. Etnisitas bahkan berada pada posisi penting dalam politik luar negeri di banyak negara baik negara besar maupun negara dunia ketiga. Isu nasionalisme etnis kemudian semakin populer ditandai dengan semakin digemarinya ide-ide negara kecil, intervensi kemanusiaan, resolusi konflik, dan isu HAM. Disamping itu, peran agama secara umum tidak akan terlepas dalam dinamika hubungan internasional. Beberapa negara menganggap bahwa agama merupakan bagian dari beberapa dimensi kehidupan termasuk didalamnya adalah norma, etika, moral, dan hukum. Untuk dapat mencapai keamanan dan perdamaian internasional maka perlu upaya yang dilakukan oleh negara dalam menangani dan mencegah berbagai konflik yang timbul dari adanya kemajemukan di masyarakatnya. Terlebih dengan adanya mobilisasi manusia yang terus berjalan semakin mendorong terciptanya negara majemuk yang didalamnya terdapat berbagai macam ras, agama, bangsa dan etnis. Hal ini kemudian menjadikan norma, identitas, instensi, dan bahasa juga mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi antar subjek/aktor. Konflik etnis dan agama dalam internal suatu negara sangat berpotensi memperburuk keamanan di negara-negara tetangga.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara dengan kemajemukan didalamnya karena memiliki penduduk yang berasal dari agama, etnis, dan ras yang berbeda. Kemajemukan di tengah masyarakat Indonesia ini kemudian dipersatukan dalam satu ikatan bangsa sehingga terbentuk negara yang besatu dan berdaulat. Dasar dari persatuan tersebut merupakan kesamaan historis, asal-usul budaya, kondisi geografis. Disamping itu, bangsa Indonesia menganggap penting ideologi dan falsafah hidup dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi sebuah pedoman dan dasar hidup dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk dan kaya akan keanekaragaman budaya dipersatukan oleh semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Semboyan tersebut berarti beraneka ragam baik itu suku, etnis, agama, ras, dan bahasa tetap satu sebagai bangsa Indonesia.

Tidak dipungkiri bahwa dalam penerapan ekspresi keanekaragaman pada masa demokrasi dapat mendorong terjadinya konflik dan masalah sosial di tengah masyarakat baik itu berupa masalah antar umat beragama maupun internal umat beragama. Mengutip dari pernyataan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diselenggarakan pada 2020, maka untuk dapat menciptakan dan mempertahankan toleransi dan kerukunan diberbagai lapisan maka penting untuk mewujudkan moderasi beragama. Dalam hal ini moderasi merupakan sebuah kunci utama dalam mendorong terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mencapai harmonisasi baik dalam kehidupan personal maupun sosial.

Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keberagaman komponen etnik, agama, ras dan budaya tersebut memiliki pola hubungan

tersendiri dan berbeda-beda dari tiap-tiap komponennya pada tiap-tiap wilayah, tersebar pada 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pencapaian dari pola hubungan yang majemuk tersebut dapat kita lihat dari bentuk toleransi antar masyarakat pada tiap-tiap daerah di 38 provinsi di Indonesia, dimana pada tiap daerah/provinsi tersebut terdapat pola hubungan interaksi yang berbeda antara agama, ras/suku dan budaya yang unik di dalamnya. Pola hubungan interaksi positif yang harmonis ini dapat dilihat dari interaksi yang tumbuh dan dipupuk ditengah kemajemukan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, suku, etnis, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda satu dengan yang lain.

Berdasarkan pada Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh SETARA Institute mengatakan bahwa Kota Singkawang Kalimantan Barat menjadi kota paling toleran se-Indonesia untuk yang ke-3 kalinya. Sebelumnya pada tahun 2018 Kota Singkawang juga telah berhasil menjadi kota paling toleran se-Indonesia dan kembali mendapatkan peringkat tertinggi kembali pada tahun 2020. Kota Singkawang memiliki tingkat toleransi dan kerukunan Bergama yang sangat tinggi dimana penduduk dengan mayoritas etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu dapat hidup berdampingan tanpa menimbulkan konflik. Mengacu pada pendapat Bingling (2000) maka dipahami bahwa selain memiliki tingkat toleransi yang tinggi, hubungan antar masyarakat dibidang ekonomi, politik, dan sosial antara warga Tionghoa dan Melayu di Singkawang berjalan dengan damai.

Mengutip dari Tjahjo Kumolo selaku menteri dalam negeri periode 2014-2019 dalam penyelenggaraan penghargaan oleh SETARA Institute menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk sehingga kondisi ini kemudian menjadi tantangan bagi kepala daerah dalam pengimplementasian regulasi-regulasi di daerahnya masing-masing agar tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Menurut Ruhana (2015) pemerintah mempunyai program yang dapat dioptimalkan dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan kerukunan umat beragama yang berada di wilayahnya. Oleh karena itu penting untuk mendukung program-program yang berhubungan dengan kerukunan melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang sepenuhnya mendorong terciptanya kerukunan di masyarakat. Menurut Labolo (2011) pada dasarnya untuk dapat mengatur kehidupan bermasyarakat yang tentram sehingga dapat hidup berdampingan ditengah berbagai isu agama yang memanas adalah dengan memaksimalkan peran pemerintah dalam membina dan menjadi perantara komunikasi berbagai pihak. Dalam hal ini pemerintah daerah menjadi tonggak utama dalam membangun dan mempertahankan kerukunan di masyarakat melalui pemberian pemahaman moral. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut maka dapat menciptakan tatanan masyarakat yang rukun dan adanya rasa kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan dan mengatur masyarakat agar dapat saling menghargai.

Untuk dapat mengkaji penelitian ini maka digunakan beberapa konsep sebagai tinjauan pustaka sebagai berikut :

1. Integrasi Nasional

Integrasi dapat dipahami sebagai sebuah proses terjadinya pembauran kebudayaan dimasyarakat sehingga membentuk kesatuan baru yang utuh. Oleh

karena itu, intergasi nasional adalah proses dari penyatuan wilayah dengan berbagai macam perbedaan didalamnya. Secara politik integrasi menjadi kesatuan dari beraneka ragam kelompok sosial dan budaya dengan tujuan membentuk identitas nasionalnya. Dalam hal ini integrasi nasional menjadi sebuah proses dimana penyatuan di dalam masyarakat oleh beberapa bagian bagian dari individu agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan kompleks, ataupun bersatunya banyak organisasi kecil menjadi satu bangsa. Diketahui bahwa bangsa Indonesia yang identik dengan pluralitas menghadapi suatu tantangan terkait cara yang digunakan untuk proses penyatuan tersebut. Sehingga diperlukan suatu integrasi nasional agar persatuan tersebut bisa tercapai. Integrasi nasional sangat penting untuk di wujudkan di Indonesia sehingga mampu menyatukan macam-macam perbedaan yang ada di negara Indonesia. Dengan hal tersebut maka diharapkan pertikaian yang berkemungkinan terjadi yang mengakibatkan perpecahan dapat di minimalisasi dan di tekan.

2. Konsep Minoritas dan Mayoritas

Kelompok minoritas pada dasarnya akan berkaitan dengan kelompok individu yang memiliki kesamaan latar belakang seperti didasari pada kesamaan suku, ras, agama, atau bahasa tertentu sehingga memunculkan sikap saling sepenanggungan antara satu dan lain. Berdasarkan kuantitas jumlah dari kelompok minoritas umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara yang bersangkutan. Adapun definisi minoritas menurut Francesco Capotorti (dalam Anandhini, 2021) adalah kelompok yang secara angka lebih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya disuatu negara. Kelompok minoritas kemudian diidentifikasi sebagai kelompok dengan posisi yang tidak dominan. Anggota kelompok minoritas memiliki karakteristik tertentu seperti etnis, agama, dan Bahasa yang berbeda dengan penduduk lainnya. Oleh karena itu, kelompok ini memiliki sikap solidaritas yang tinggi untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya dan tradisinya.

Relasi antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas cenderung mengarah kepada persaingan, ketegangan, dan konflik. Sebuah negara majemuk yang terdiri atas berbagai macam etnis, agama, dan bahasa akan melahirkan kelompok minoritas dan mayoritas di dalamnya sehingga prasangka dan diskriminasi antar kelompok tersebut tidak dapat dihindari. Kedua kelompok ini akan berpotensi melahirkan konflik internal suatu negara. Kelompok mayoritas dikenal sebagai kelompok yang berpengaruh besar dalam berbagai sektor sehingga kelompok ini secara jumlah merupakan mayoritas. Umumnya apabila terdapat etnis yang dominan maka nilai-nilai dari kebudayaan etnis tersebut menjadi acuan dalam menilai tindakan yang benar dan salah oleh masyarakat setempat. Hal ini akan berlaku pada kelompok yang bukan merupakan bagian dari kelompok dominan tersebut.

3. Teori Peran

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto (2001) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani sesuai dengan statusnya. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Maka dapat dipahami bahwa perangkat peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang

didasari oleh *role* yang dimiliki suatu individu karena status sosila khusus yang dimilikinya. Pada dasarnya peran dirumuskan menjadi rangkaian tingkah laku tertentu akibat suatu jabatan tertentu. Sehingga kepribadian individu berpotensi untuk mempengaruhi peran yang dijalankan tersebut.

Soerjono Seokanto (2002) menyebutkan bahwa terdapat syarat-syarat khusus dalam mendefinisikan peran yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

4. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah terdiri dari perangkat pemerintahan tingkat daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didalamnya. Sebagai aspek yang dinamis maka peranan yang dilakukan oleh seseorang terbagi menjadi dua yaitu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Peranan dan kedudukan akan selalu berkaitan dengan kepentingan sehingga aspek-aspek ini tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dalam hal ini peran pemerintah daerah terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya yaitu (Arif dalam Nurdin, 2014) :

- 1) Peran pemerintah sebagai Regulator, dalam hal ini pemerintah sebagai penentu dan menyiapkan arah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan regulasi.
- 2) Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak.
- 3) Peran pemerintah sebagai Fasilitator, dalam hal ini menciptakan keadaan yang kondusif guna penyelenggaraan pembangunan secara optimal.
- 4) Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berkedudukan sebagai pihak yang dapat mempercepat optimalisasi pembangunan dan pengembangan potensi dari suatu daerah sehingga dapat menjadi contoh sosial dalam pembangunan partisipasi.

Dalam pencapaian kota Singkawang sebagai kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi dan kolaborasi berbagai pihak, baik peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat. Peneliti merasa tertarik dan memandang penting untuk dapat meneliti lebih jauh terkait bagaimana peran pemerintah daerah kota Singkawang dalam menjalankan fungsinya demi mewujudkan harmonisasi di tengah kemajemukan masyarakat Kota Singkawang. Sehingga dibutuhkan penelitian ini untuk melihat dan menganalisa bagaimana peran pemerintah daerah kota Singkawang dalam mewujudkan toleransi di kota Singkawang, dan mendapat predikat 3(tiga) kali berturut-turut sebagai kota paling toleran se-Indonesia dari tahun 2018-2022.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan data yang bersumber dari interpretasi terhadap

data yang ditemukan dilapangan sehingga pendekatan ini juga dikenal sebagai *etho-methodology*. Menurut Rukin (2019) penelitian kualitatif menjadi sebuah riset yang cenderung menggunakan pendekatan induktif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menafsirkan penelitian secara kritis serta mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam interaksi sosial manusia untuk memperoleh konteks kehidupan nyata. Penelitian kualitatif juga mempunyai beberapa ciri umum seperti sistematika, logika berdasarkan logika dan penalaran, sifat empiris berdasarkan pengalaman peneliti, sifat metodis, umum dan kumulatif. Bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari beberapa sumber dan pada penelitian ini lebih mengacu pada dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono,2011).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Singkawang

Kota Singkawang adalah salah satu Pemerintahan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini terletak diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kota Singkawang merupakan kota terkecil setelah Kota Pontianak apabila dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten atau kota lainnya di Kalimantan Barat. Berdasarkan UU No.12 Tahun 2001 maka telah jelas menerangkan bahwa Kota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang. Dinamika kehidupan yang ada di kota ini berjalan dengan dinamis dimana pembangunan yang terus berlangsung diberbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua sektor mengalami perkembangan yang signifikan.

Kota Singkawang terletak pada 0°44'55,85" - 01°01'21,51" Lintang Utara dan 108° 51'47,6" - 109° 10'19" Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Luas wilayah Kota Singkawang 504 Km² (50.400 Ha) atau sekitar 0,34 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Batas-batas wilayah selengkapnya untuk Kota Singkawang adalah:

- Utara : Kabupaten Sambas
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna

Terdapat 5 kecamatan dan 26 kelurahan di Kota Singkawang dengan kecamatan Singkawang Timur sebagai kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.761,71 Ha, sementara Kecamatan Singkawang Barat menjadi wilayah dengan luas terkecil yaitu 1.415,71 Ha dari total luas wilayah kota Singkawang. Secara geografis, Singkawang merupakan daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir, paling cepat mengalami perubahan (Juniardi dan Marjito 2018). Sebagai salah satu kota yang memiliki pluralitas maka penduduk kota Singkawang terdiri dari berbagai macam etnis dan memiliki keberagaman corak budaya. Tentunya hal ini akan mempengaruhi interaksi antar budaya dan berdampak pada terjadinya asimilasi atau pembauran antara budaya dan sosial. Pembauran budaya ini dapat terjadi melalui berbagai macam cara diantaranya

adalah dengan perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi dalam kehidupan sosial dimasyarakat seperti hubungan bertetangga. Melalui berbagai macam interaksi ini kemudian akan melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial yang didalamnya terdapat pertemuan berbagai macam budaya yang berbeda. Sebagai kota dengan jumlah penduduk Tionghoanya mencapai 42% maka Kota Singkawang dikenal sebagai kota Pecinaan Indonesia. Tidak hanya warga Tionghoa Kota Singkawang juga dihuni oleh beberapa etnis lainnya seperti etnis Melayu, Dayak, Jawa, Madura, dan beberapa etnis pendatang lainnya. Kota Singkawang juga dikenal sebagai “Kota Seribu Kelenteng” dikarenakan bangunan vihara atau kelenteng banyak dijumpai di seluruh kota. Pada mulanya Singkawang merupakan pelabuhan bagi transitnya kapal-kapal penambang dari Tiongkok. Kemudian pada abad ke-18 M penambang dari Tiongkok diundang oleh penguasa lokal Singkawang sehingga orang-orang Tiongkok semakin bertambah.

Meskipun memiliki perbedaan etnis namun tidak menjadikan masyarakat Singkawang diterpa permasalahan etnis. Masyarakat Kota Singkawang dapat hidup rukun dan beradampingan di tengah perbedaan. Tidak jarang ditemui perkawinan antar etnis seperti orang Tionghoa dan Dayak yang akan menghasilkan keturunan yang disebut sebagai “*Pan Thong Pan*”. Percampuran budaya pada masyarakat Singkawang juga dapat ditemui pada peralatan pertanian, dimana terdapat unsur keetnisan. Masyarakat mengubah model peralatan pertanian cara Hakka termasuk alat-alat seperti bajak, sabit, lumpang, dan lain sebagainya menjadi alat pertanian ala masyarakat Dayak yaitu tongkat penggali (Rahmayani dalam Suprpta,dkk, 2019).

Masyarakat di Kota Singkawang yang hidup secara berdampingan dalam perbedaan tanpa adanya prasangka dan menjunjung tinggi kesetaraan kebudayaan masing-masing. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Kota Singkawang unik. Multi etnis berarti akan berbanding lurus dengan kemajemukan budaya didalamnya (Purmintasari dan Yulita,2017). Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa semua kebudayaan pada prinsipnya sama dan harus diperlakukan adil.

Peran Pemerintah Kota Singkawang Dalam Mewujudkan Toleransi melalui Peraturan Walikota No.129 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota No. 130 Tahun 2021.

Peraturan Walikota Singkawang No.129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Walikota Singkawang No.130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang dalam rangka menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Singkawang yang multietnis. Praktik toleransi yang terselenggara di Kota Singkawang merupakan bentuk nyata dari terimplementasi dengan baiknya kedua peraturan walikota tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Singkawang menjadi pihak utama dalam menjaga keharmonisan masyarakatnya dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi tersebut dalam bentuk keteladanan dan aksi nyata.

Dalam penilaian yang dilakukan oleh Institute Setara, Peraturan Walikota Singkawang No.129 tahun 2021 dan Peraturan Walikota No.130 Tahun

2021 menjadi nilai tambah yang dapat menjadikan Kota Singkawang sebagai kota paling toleran. Dengan adanya kebijakan tersebut indikator penilaian terhadap Kota Singkawang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk dapat menjaga ketentraman internal masyarakat Kota Singkawang yang majemuk. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi dalam mencegah berbagai tindakan yang mengarah kepada intoleran di masyarakat. Melalui peraturan ini pula pemerintah Kota Singkawang dapat mengambil tindakan-tindakan dalam menangani sikap intoleransi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Masyarakat Kota Singkawang juga menyambut dengan baik peraturan ini, hal ini lah yang semakin memudahkan pemerintah Kota Singkawang dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi sekaligus memfasilitasi masyarakat dalam hal menjunjung tinggi toleransi.

Pada dasarnya Kota Singkawang yang multikultur dan terdiri dari berbagai macam rumpun budaya, etnis, dan agama sangat berpotensi terjadi gesekan konflik. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi celah konflik karena masyarakat Kota Singkawang tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan kepercayaan, adat istiadat, dan budayanya masing-masing tanpa saling mengganggu. Sehingga Kota Singkawang sangat terbuka dengan kehadiran budaya-budaya lain yang masuk ke Kota Singkawang.

Peran Pemerintah Kota Singkawang dalam Mewujudkan Toleransi melalui Komunikasi Lintas Etnis dan Agama

Dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Kota Singkawang mengedepankan pendekatan *softskill* yaitu menjalin komunikasi dengan masyarakat baik komunikasi lintas etnis maupun lintas agama. Dengan adanya komunikasi yang baik maka mempermudah antisipasi sedini mungkin apabila terdapat indikasi tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Kota Singkawang. Dengan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya dinilai efektif dalam mewujudkan terselenggaranya toleransi di Kota Singkawang. Komunikasi yang terjalin juga menjadi salah satu cara memvalidasi kembali informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga terhindar dari narasi-narasi yang mengarah pada tindakan intoleran.

Tokoh-tokoh agama dan budaya menjadi perantara bagi pemerintah Kota Singkawang dalam menyampaikan informasi terkait toleransi kepada masyarakat. Sehingga dalam penerapan kebijakan masyarakat cukup kondusif dan terhindar dari adanya gesekan antar etnis dan antar agama. Selain itu, dialog yang dilakukan juga memanfaatkan kemajuan teknologi seperti melalui kanal Youtube yang dimanfaatkan oleh Walikota Singkawang berdialog langsung dan masyarakat dengan mudah dapat mengakses.

Secara spesifik belum pernah terjadi konflik lintas agama di Kota Singkawang, namun pada tahun 2021 pernah terjadi kesalahpahaman masyarakat di Singkawang Utara. Oleh karena itu, masyarakat langsung membuat laporan terkait adanya kasus warga masyarakat yang beribadah hingga larut malam sehingga mengganggu masyarakat sekitarnya. Hal ini kemudian dilakukan dialog dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi dan jalan tengah agar keputusan yang dihasilkan dapat

menghormati semua pihak. Dialog tersebut melibatkan ketua RT dan Lurah setempat kemudian kasus ini dilaporkan kepada Kesbangpol untuk dilakukan dialog. Namun, kasus ini tidak membesar dan dapat segera diatasi berkat dialog damai yang telah dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah bersama tokoh-tokoh agama dan masyarakat Kota Singkawang dapat menyelesaikan permasalahan yang mengarah pada perbedaan etnis dan agama tanpa menimbulkan perkelahian di masyarakat.

Peran Kesbangpol dalam Mewujudkan Toleransi di Kota Singkawang

Dalam mewujudkan toleransi di Kota Singkawang Kesbangpol mendukung penuh melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap organisasi dengan anggotanya yang majemuk dan terdiri dari berbagai etnis dan agama. Organisasi yang dimaksud adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Forum Pembauran Kebangsaan yang melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki posisi strategis sehingga mudah untuk berdialog. Karena bahasa yang digunakan ke masyarakat harus dipoles (diberikan pemahaman) dan gerakannya tidak bisa anarkis serta harus bertahap. Toleransi menjadi gerak bersama semua lini tidak hanya Kesbangpol.

Kesbangpol Kota Singkawang telah mengalokasikan hibah dan memberikan kebebasan kepada FKUB untuk menggunakan dana tersebut pada kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Nilai dari dana hibah tersebut mencapai kurang lebih Rp.72.000.000 dan umumnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FKUB secara berjenjang karena FKUB bertanggung jawab kepada pemerintah Kota Singkawang melalui Kesbangpol. Pertanggungjawaban dana yang digunakan oleh FKUB harus dilaporkan secara berkala kepada Kesbangpol. Badan Kesbangpol juga secara rutin melakukan pertemuan bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Singkawang. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjalin lebih dalam hubungan dengan pihak tokoh masyarakat yang juga memiliki peranan penting dalam terciptanya toleransi di masyarakat Kota Singkawang. Kesbangpol juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengenalan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat luas. Media sosial yang digunakan seperti Instagram, Tiktok, dan Facebook. Melalui media sosial tersebut dapat menyampaikan informasi-informasi yang menjangkau seluruh lini masyarakat secara efektif dan efisien.

Dalam memaksimalkan peran dari Kesbangpol Kota Singkawang, setiap tiga bulan dilakukan pelaporan hasil survey dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh kesbangpol. Survey ini menggunakan metode yang sederhana yaitu diberikan akses berupa scan barcode dimana masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya melalui kanal tersebut dari *google form*. Selain itu, terdapat pula survey pengaduan jika ada oknum di Kesbangpol yang tidak memberikan layanan dengan baik kepada masyarakat seperti meminta biaya tambahan dan dengan sengaja memperlambat layanan. Hasil dari survey tersebut kemudian menjadi bahan untuk dianalisis dan sebagai bahan self assessment guna perbaikan diri untuk kedepannya. Sehingga Kesbangpol dapat memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat Kota Singkawang. Kesbangpol Kota Singkawang juga memiliki staf intel di bidang kesatuan bangsa pada sub koordinator kewaspadaan penangan konflik yang dimana terdapat analisis dan pengolahan data. Oleh karena itu, toleransi yang terjaga saat ini di

Kota Singkawang merupakan hasil dari kerjasama antara Kesbangpol, sekretariat daerah, lembaga polres, kejaksa, tokoh agama, FKUB, FPK, dan Forum kewaspadaan sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Untuk dapat mengeratkan toleransi dalam masyarakat, pemerintah juga sering mengadakan event budaya, event nasional, dan event dinas terkait seperti Kesbangpol, Kodim, dan Polres. Hal ini akan membangun semangat persatuan di masyarakat dan mengurangi celah konflik.

Peran Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dalam Mewujudkan Toleransi di Kota Singkawang

FKUB berfokus pada pemeliharaan kerukunan umat beragama di masyarakat guna menghindari terjadinya konflik. FKUB juga bertanggung jawab dalam memberdayakan umat beragama dalam rangka mencapai kerukunan dan kesejahteraan. Adapun tugas pokok FKUB adalah melakukan dialog dan musyawarah terkait hal-hal yang berhubungan dengan keurukunan umat beragama, sosialisasi toleransi di masyarakat, dan regulasi peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat hingga ke tingkat daerah yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama. FKUB juga bertugas sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan kerukunan dan toleransi. Aspirasi tersebut kemudian akan disampaikan dan direkomendasikan kepada walikota untuk ditindak lanjuti dalam rangka memelihara keurukunan antar umat beragama di masyarakat. Tugas pokok FKUB lainnya adalah merekomendasikan rumah ibadah yang akan dibangun. Rekomendasi ini akan berhubungan dengan pemberian izin pendirian rumah ibadah di wilayah kerja tersebut. Adapun kebijakan dan regulasi dari FKUB secara regulasi merupakan pengurus yang di SK kan oleh Walikota Singkawang.

Namun, terdapat perubahan regulasi dimana FKUB mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp. 72.000.000 dari Kesbangpol untuk digunakan sesuai proposional yang dimohonkan. Dana tersebut biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan silaturahmi antar umat beragama, sosialisasi, kegiatan dialog, dan lain lain yang bertujuan untuk mengeratkan kerukunan umat beragama. Sebelumnya dana yang digunakan oleh FKUB berasal dari dana APBD atau APBN dan di bawah Kabagkesra pemerintah kota sekitar Rp.80.000.000. Melalui dana ini maka FKUB memaksimalkan perannya sesuai dengan tugas nya sebagai wadah aspirasi masyarakat umat beragama dan tujuan kemaslahatan serta kerukunan di Kota Singkawang. Maka dalam hal ini disamping menjalankan tiga tugas pokoknya, FKUB juga memiliki program yang bernilai tambah yaitu merawat dan mempertahankan Kota Singkawang sebagai kota toleran terbaik di Indonesia.

Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Toleransi di Kota Singkawang

Dalam hal ini tokoh agama Islam di Kota Singkawang juga aktif melakukan interaksi dengan tokoh agama lainnya baik diforum lintas agama maupun di luar forum. Interaksi ini dapat dilakukan dimana saja mengingat kota Singkawang telah terlabel sebagai kota wisata, jasa, dan perdagangam yang melibatkan berbagai suku etnis dan berbagai agama didalamnya. Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama Islam untuk mempertahankan sikap toleransi antar

umat beragama di Kota Singkawang adalah melalui penyampaian pesan yang berhubungan dengan toleransi kepada masyarakat yang beragama Islam oleh pemuka agama seperti ustad dan kyai pada saat kegiatan keagamaan. Tokoh agama seperti ustad selalu menyampaikan bahwa agama Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'alamin* maka sebagai khalifah di muka bumi harus saling menyayangi dan menghormati. Hal ini disampaikan dalam berbagai tausiyah dan ceramah juga di berbagai keilmuan muslim di madrasah disemua tingkat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh agama Katolik dalam mewujudkan toleransi di Kota Singkawang adalah dengan terlibat dalam perayaan agama lain seperti perayaan Waisak dan pemberian hewan kurban pada saat Idul Adha oleh umat Islam. Tokoh agama Katolik secara aktif memberikan bantuan yang digunakan oleh umat Kristen untuk membangun rumah ibadah gereja. Hal ini dilakukan agar toleransi dan moderasi di Kota Singkawang tetap berjalan. Penghargaan yang didapatkan oleh Kota Singkawang sebagai kota paling toleran di Indonesia merupakan hasil dari kerjasama antar tokoh agama dan peran dari masyarakat yang sangat terbuka dalam menerima perbedaan. Menurut tokoh agama Katolik di Kota Singkawang, permasalahan yang diselesaikan kemudian sebisa mungkin diantisipasi agar tidak terulang kembali. Oknum yang diantisipasi membawa perpecahan cenderung oknum dari luar bukan merupakan warga Singkawang. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan oleh tokoh agama Katolik kepada masyarakat selalu menekankan pada hidup rukun dan damai.

Tokoh agama Budha melakukan beberapa upaya dalam menghindari perpecahan dan meningkatkan toleransi di Kota Singkawang. Upaya tersebut diantaranya adalah berkoordinasi dengan beberapa instansi-instansi terkait, lembaga, ormas, dan semua pihak yang menangani kegiatan ibadah bagi umat beragama budha baik di internal maupun eksternal. Sebagai tokoh agama Budha yang dihormati oleh masyarakat tentunya mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat Budha dalam memaknai toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, komunikasi selalu dilakukan terutama terkait hal-hal yang dapat memajukan visi dan kementrian agama dimana moderasi harus dibangun dan menyentuh setiap lini tidak hanya pada sistem pemerintahan saja.

Pada hakikatnya harus terjalin kerjasama antara para tokoh agama dan pemerintah Kota Singkawang dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kerukunan dimasyarakat. Adapun pesan kerukunan yang selalu disampaikan oleh tokoh agama Budha adalah agar umat tetap menjaga toleransi dan mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Bentuk toleransi yang dilakukan oleh masyarakat beragama Budha adalah ikut serta dalam perayaan hari besar agama lainnya. Misalnya pada saat bulan Ramadhan maka umat Budha akan terlibat dalam acara buka puasa bersama dan bakti sosial. Selain itu, juga terdapat kegiatan donor darah yang bertujuan untuk saling menjaga dan bersinergi.

Adapun bentuk toleransi umat beragama yang dilakukan oleh masyarakat Konghucu dan tokoh agama konghucu adalah dengan menumbuhkan sifat gotong royong, mengayomi dan membuka diri, dan cepat tanggap dalam merespon hal-hal kecil. Dalam agama Konghucu baik di pusat maupun daerah cenderung sama, jika ada bencana disuatu daerah maka masyarakat maupun tokoh agama Konghucu selalu memberikan bantuan sosial. Masyarakat Konghucu tidak melihat melalui kacamata agamanya namun

melihat secara sosial. Sampai sejauh ini aktivitas keagamaan telah dilakukan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Tokoh agama Konghucu juga menyadari bahwa pentingnya untuk mengikuti tren perkembangan di media sosial mengingat platform tersebut dapat diakses oleh semua pihak dan rentan terhadap narasi-narasi negatif yang mengandung unsur intoleran. Oleh karena itu tokoh agama harus pro aktif menjalin komunikasi baik dengan internal lingkungan agama maupun antar tokoh agama.

KESIMPULAN

Kota Singkawang merupakan kota yang memiliki keberagaman etnis, budaya dan agama didalamnya. Namun, ditengah perbedaan ini tidak terdapat celah konflik dikarenakan tingginya toleransi dan kerukunan beragama di Kota Singkawang. Perbedaan tersebut pula yang menjadikan Kota Singkawang sebagai kota paling toleran di Indonesia sebanyak tiga kali terhitung sejak tahun 2018, 2020, dan 2022. Penghargaan ini diberikan oleh SETARA Institue dengan skor yang berhasil diraih sebanyak 6,583 berdasarkan 4 variabel penilaian dan 8 indikator. Penghargaan ini diraih berkat kerjasama dari berbagai pihak dalam mewujudkan toleransi di Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang mempunyai kontribusi besar dalam mempertahankan nilai-nilai toleransi agar tetap terjaga. Melalui Peraturan Walikota Singkawang No.129 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat dan Peraturan Walikota Singkawang No.130 tahun 2021 tentang Penangan Konflik menjadi acuan bagi pemerintah Kota Singkawang dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat dan menangani berbagai permasalahan yang berhubungan dengan intoleran di Kota Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang mengedepankan pendekatan berbasis komunikasi dengan masyarakat sehingga dapat mencegah munculnya konflik sedini mungkin.

Peran pihak lainnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga berkontribusi besar dalam terwujudnya toleransi di Kota Singkawang. FKUB bertanggungjawab dalam memberdayakan umat beragama dalam rangka mencapai kerukunan dan kesejahteraan. Dalam hal ini FKUB menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat, melakukan dialog dan musyawarah, serta regulasi perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Tokoh agama di Kota Singkawang juga aktif melakukan interaksi dengan masyarakat. Untuk mempertahankan sikap toleransi antar umat beragama melalui penyampaian pesan yang berhubungan dengan toleransi kepada masyarakat. Tokoh agama merupakan pihak yang dihormati oleh masyarakat sehingga besar kemungkinan bagi masyarakat untuk mematuhi pesan yang disampaikan tersebut. Pemerintah sering kali berkoordinasi dengan stake holder dan FKUB terkait bagaimana kebijakan yang bias di regulasikan terkait kerukunan dan toleransi.

REFERENSI

Book:

Bingling, Y. (2000). "Chinese Democracies A Study of the Kongsis of West Borneo (1776-1884)". Leiden: Universitas Leiden.

- Khalikin, A. (2013). "Peran pemerintah daerah dan kantor kementerian agama dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama". Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Rahmayani, Any. (2014). "Permukiman Tionghoa di Singkawang Dari Masa Kongsi Hingga Masa Kolonial". Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indo.
- Soekanto. (2001). "Sosiologi Sebagai Pengantar". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. (2002). "Teori Peranan". Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung : Alfabeta.
- Suprpta, B. A. S. M. N. A. (2019). *Buku Pengayaan Dari Singkawang Merayakan Kebhinekaan*. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan.

Journal Online:

- Anandhini, F. N. (2021). Peran United Nations Human Rights Council (UNHRC) dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Zainichi Koreans di Jepang. *Padjajaran Journal of International Relations*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i1.30694>
- Juniardi, K., Emusti, D., & Marjito, R. (2018). Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat Plural (Studi Kasus di Kota Singkawang). *Handep*, 1(2), 17-34.
- Purmintasari, D. Y. H. Y. (2017). Tatung Perekat Budaya di Singkawang. *Jurnal Ilmu -Ilmu Sosial*, 14(1), 1-7.
- Ruhana, S., A. (2015). "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Bina Praja*. 2(7). Pg. 185 - 194.
- Thaha, Rasyid. (2019). "Penetaan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 1 Januari 2019".
- Ulum, R. (2018). Institusi Minoritas dan Struktur Sosial di India. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 17(1), 8-27.
- Zakso, A. (2012). Pelestarian dan Akulturasi Adaptasi Budaya Daerah Kasus di Singkawang. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 3(2), 91-105.

Skripsi

- Nurdin, Muhammad. (2014). "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa". Universitas Muhammadiyah Makassar.

Online Newspaper

- Kominfo. Moderasi Beragama, Kunci Terciptanya Toleransi dan Kerukunan Bangsa, Diakses 28 April 2023 dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30558/moderasi-beragama-kunci-terciptanya-toleransi-dan-kerukunan-bangsa/0/berita>
- KPKNL Singkawang, Kota Singkawang, Mutiara Terpendam di Kalimantan Barat, Diakses 28 April 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca->

[artikel/14166/Kota-Singkawang-Mutiara-Terpendam-di-Kalimantan-Barat.html](#)

Media Indonesia, Singkawang Pertahankan Predikat Kota dengan Indeks Toleransi Tertinggi, Diakses 28 April 2023 dari

<https://mediaindonesia.com/nusantara/572029/singkawang-pertahankan-predikat-kota-dengan-indeks-toleransi-tertinggi>

Oxtora, R. (2023). *Kota Singkawang kembali raih predikat Kota Tertoleran se-Indonesia*. Antara. Diakses pada 6 Oktober 2023 dari

<https://www.antaraneews.com/berita/3477423/kota-singkawang-kembali-raih-predikat-kota-tertoleran-se-indonesia>